

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Eni Suhaeni, dkk., *Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu: Perspektif Politik dan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Fitriyah, *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1997.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Labolo, Muhadam, *Parpol dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Rahadi, B.P., *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik*, Deepublish, Yogyakarta, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.

Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* (terjemahan SPA Teamwork), Nusa Media, Bandung, 2008.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Jurnal:

Ahmad, Junaidi & Agmar Media, “Penegakan Hukum KePemiluan untuk Pemilu Bermartabat,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 78.

Lusiana, Wyda dan Sarbini, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 9, No. 2, November, 2023. DOI: <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5653>.

Mandak, Marsel Jerolson Samuel, “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi”, *Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 3, Mei, 2015. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7904>.

Remaja, Nyoman Gede, ‘Makna Hukum Dan Kepastian Hukum’, *Kertha Widya Jurnal Hukum*: Vol. 2 No. 1, Agustus 2014. DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>

Sukedi, Mochammad *et al*, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Konstitusionalitas Hasil Pemilu”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 6, No. 2, Oktober, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>

Hasil Penelitian/ Tugas Akhir:

Mara, T. Nurthian, 2007, *Perbandingan Muatan Materi Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Studi Tentang KPU Pusat Sebagai Penyelenggara Pemilu)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Prasetyo, Iwan Budi, 2010, *Analisis Penetapan Parpol Peserta Pemilu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396).

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 692).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92).

Wawancara:

Ghufron, S.H., MH., C.C.D., Kuasa Hukum Partai PAN, DPP Partai PAN,
Surabaya, 17 Juni 2025.